



ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TERRITORIAL DEVELOPMENT POLICY BY THE INDONESIAN ARMY (TNI AD) FOR SOCIAL CONFLICT PREVENTION IN KODIM 0618/CITY OF BANDUNG

Very Grahita Fitriang ^{1*}, Pantius Drahen Soeling ¹

¹ Master Administrative Science and Public Policy Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Indonesia

* Corresponding Author: - very.grahita@ui.ac.id

Article Information

Submitted : 10/02/2024
Review : 12/02/2024
Accepted : 28/03/2024
Published : 30/04/2024

DOI

<https://doi.org/10.25077/jakp.9.1.69-86.2024>

Keywords

**Policy Implementation;
Coaching; Territorial;
Social Conflict**

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the Army's territorial development policy for the prevention of social conflict and the inhibiting factors in the implementation of the Army's territorial development policy for the prevention of social conflict at Kodim 0618 / Bandung. The author tries to find out how the implementation of the Army's territorial development policy for social conflict prevention uses Grindle's theory (2017) and the inhibiting factors in the implementation of the Army's territorial development policy for social conflict prevention. The research approach of this thesis is post positivism using qualitative methods, data collection through in-depth interviews and literature studies. The results of the analysis show that the implementation of the Indonesian Army's territorial development policy for the prevention of social conflict has been running optimally based on 3 (three) variables, namely content of policy, context of policy, and policy goals. Factors inhibiting policy implementation include changes as a result of interventions that are not yet optimal. Furthermore, in terms of mastery of technology, the majority of Chapters are still lacking. Low public awareness of the negative impacts of social conflict. Communication patterns of residents who are still less open. Lack of concern from community leaders to foster their citizens.

PENDAHULUAN

Konflik dalam masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang sangat tinggi paling potensial bahkan sering terjadi adalah konflik horizontal. Adanya heterogenitas bahasa, suku, agama, dan identitas lainnya karena dalam kehidupan sehari-hari, realitas sosial

akan menampilkan proses interaksi yang tidak jarang memunculkan fenomena memaksakan unsur-unsur budaya tertentu, mencoba memasukkan unsur-unsur keyakinan yang dianut, bahkan adanya keinginan untuk mendominasi. Fenomena ini kemudian akan berkembang dan menjadi potensi konflik yang terpendam. Potensi ini muncul karena adanya diferensiasi tingkatan seperti status sosial dari pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan. Indonesia adalah dua sisi mata pisau dari heterogenitas di dalamnya atau sistem majemuk yang dimiliki. Pada satu sisi heterogenitas tersebut menjadi sebuah tatanan sosial yang sangat holistik dan menjadi kelebihan tersendiri, tetapi pada sisi lain adalah bom waktu yang dapat meledak kapan pun menjadi sebuah konflik. Catatan telah menunjukkan adanya konflik sosial dengan berbagai skalanya baik yang berlangsung sebagai konflik horizontal maupun konflik sosial secara vertikal.

Penelitian mengenai penanganan konflik sosial dilakukan oleh Susilo Endro Basuki (2008) tentang Peran TNI Angkatan Darat dalam Mendukung Pertahanan Negara, pembinaan teritorial terus dilakukan sebagai salah satu syarat mutlak terselenggaranya strategi pertahanan semesta. Bina teritorial juga dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik dan non fisik. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Sri Widodo Mulyono (2015) dengan analisis optimalisasi kemampuan deteksi dini dan mitigasi risiko konflik oleh satuan koramil dalam pencegahan terjadinya konflik sosial dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah (Studi di Koramil 05/Pasar Kliwon, Kodim 0735/Surakarta, Jawa Tengah), yang menjelaskan bahwa adanya hambatan yang dihadapi oleh Koramil 05/Pasar Kliwon antara lain terbatasnya jumlah SDM, sarana dan prasarana, koordinasi dan komunikasi, serta anggaran dalam mendukung kegiatan. Keberhasilan upaya deteksi dini dan mitigasi konflik sosial yang dilakukan Koramil 05/Pasarkliwon bisa dikatakan berhasil menekan potensi konflik sosial yang ada dan berhasil memitigasi konflik sosial, sehingga dapat mewujudkan pembangunan ketahanan wilayah.

Tabel. 1. Data Konflik Sosial Jawa Barat Tahun 2019-2021

Jenis Konflik		Jumlah Kasus	Nilai Rata-rata Tiap Tahun
Kasus Berdasarkan Desa/Kelurahan di Jawa Barat	Konflik	Berdasarkan data tahun 2021, total Jumlah Kasus adalah 170, naik 11.18%	Nilai rata-rata Jumlah Kasus tiap tahun adalah 220 dalam 3 Tahun Terakhir
Kasus Berdasarkan Desa/Kelurahan di Jawa	Konflik Antarsuku	Berdasarkan data tahun 2021, total Jumlah Kasus adalah 18, turun -16.67%	Nilai rata-rata Jumlah Kasus tiap tahun adalah 126 dalam 3 Tahun Terakhir

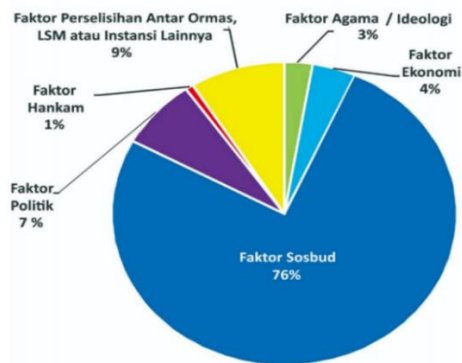
Barat			
Kasus Antarpemuda Berdasarkan Desa/Kelurahan di Jawa Barat	Konflik	Berdasarkan data tahun 2021, total Jumlah Kasus adalah 270, turun -15.56%	Nilai rata-rata Jumlah Kasus tiap tahun adalah 307,33 dalam 3 Tahun Terakhir
Barat			
Kasus Konflik Masyarakat Antar Desa Berdasarkan Desa/Kelurahan di Jawa Barat	Kelompok	Berdasarkan data tahun 2021, total Jumlah Kasus adalah 171, turun -15.2%	Nilai rata-rata Jumlah Kasus tiap tahun adalah 235,67 dalam 3 Tahun Terakhir
Barat			
Kasus Konflik Masyarakat Aparat Pemerintahan Berdasarkan Desa/Kelurahan di Jawa Barat	Kelompok dengan Aparat Pemerintahan	Berdasarkan data tahun 2021, total Jumlah Kasus adalah 113, turun -23.01%	Nilai rata-rata Jumlah Kasus tiap tahun adalah 197 dalam 3 Tahun Terakhir
Barat			
Kasus Antaragama Berdasarkan Desa/Kelurahan di Jawa Barat	Konflik	Berdasarkan data tahun 2021, total Jumlah Kasus adalah 15, turun -40%	Nilai rata-rata Jumlah Kasus tiap tahun adalah 39,67 dalam 3 Tahun Terakhir
Barat			
Kasus Konflik Masyarakat Aparat Keamanan Berdasarkan Desa/Kelurahan di Jawa Barat	Kelompok dengan Aparat Keamanan	Berdasarkan data tahun 2021, total Jumlah Kasus adalah 72, turun -30.56%	Nilai rata-rata Jumlah Kasus tiap tahun adalah 169 dalam 3 Tahun Terakhir

Sumber: *opendata.jabarprov.go.id*

Hal-hal tersebut sering kali terjadi di kota besar, termasuk di Kota Bandung yang merupakan ibu kota besar sehingga ada dampak logis berupa tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber, konflik sosial yang ada di Provinsi Jawa Barat terjadi dengan intensitas yang tinggi. Pada tahun 2021, konflik sosial Antarpemuda Berdasarkan Desa/Kelurahan di Jawa Barat yang banyak kasus mencapai 270 kasus. Konflik sosial merupakan sebuah hambatan dalam menjalankan Sishankamrata. Dengan berbagai skala apalagi terjadi dalam intensitas yang tinggi, konflik sosial menjadi pengganggu stabilitas nasional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Segala bentuk benturan fisik berupa kekerasan yang memiliki dampak secara luas terhadap keamanan dan disintegrasi sosial dengan demikian harus diselesaikan berdasarkan pendekatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

tersebut sebagai landasan hukumnya.

Gambar 1. Diagram Potensi Konflik Sosial di Kota Bandung Tahun 2022



Sumber: Bakesbangpol Kota Bandung

Berdasarkan diagram diatas dijelaskan bahwa potensi konflik yang terjadi di Kota Bandung di dominasi oleh faktor sosial budaya sebesar 76% yang diikuti oleh faktor perselisihan antar ormas, LSM atau instansi lainnya sebesar 9%, faktor politik sebesar 7%, faktor ekonomi 4%, faktor agama/ideologi 3%, dan faktor hankam sebesar 1%. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembinaan teritorial TNI AD dalam pencegahan konflik sosial di kodim 0618/Kota Bandung masih mengalami permasalahan mulai dari penanganannya sendiri itu tidak sesuai dengan realita. TNI AD sifatnya untuk membantu pemerintah daerah apabila dibutuhkan dan terjadi konflik sosial. Permasalahan utama di lapangan karena di lapangan SOP antara TNI dengan polri akhirnya bertabrakan, koordinasi antara pemerintah daerah dan TNI tidak sesuai dengan di lapangan sehingga menimbulkan suatu permasalahan karena rata-rata pemerintah daerah belum mengetahui permasalahan bagaimana TNI menangani konflik sosial tersebut. Harapannya TNI bisa membantu dalam penanganan konflik sosial yang terjadi apabila polisi tidak mampu mengatasinya.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh tiga variabel, yakni isi kebijakan (*content of policy*), lingkungan implementasi (*context of implementation*), *policy goals*. Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Variabel implementasi kebijakan sendiri dikaji dengan berlandaskan penilaian atas rencana dan implementasi yang berfokus pada perencanaan

dan program kebijakan pembinaan teritorial yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang dibuat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menggunakan teori dari Grindle untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dari model implementasi kebijakan (Grindle, 2017) meliputi *content dan context*. Alasan peneliti menggunakan teori Grindle dimensi yang dikemukakan sangat relevan dalam mengatasi fenomena yang terjadi sehingga peneliti menggunakan teori tersebut dalam memecahkan permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, maka dibutuhkan aksi nyata yang dilakukan oleh Kodim sebagai Satuan Komando Wilayah (Satkowil) yang merupakan unsur kekuatan teritorial TNI-AD dalam rangka mendukung dan melaksanakan Pembinaan Teritorial (Binter). Kodim sebagai satuan teritorial dalam mendukung tugas pokok TNI-AD, dalam kasus ini Kodim 0618/Kota Bandung, perlu dikaji peran dan tugasnya dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna mewujudkan ketahanan wilayah yang diwujudkan dengan pencegahan konflik sosial.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini akan mencoba membahas tentang implementasi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Pencegahan Konflik Sosial di wilayah teritorial Kodim 0618/Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembinaan teritorial TNI AD untuk pencegahan konflik sosial di Kodim 0618/Kota Bandung serta mekanisme implementasi pembinaan teritorial dihadapkan dengan persoalan-persoalan konflik sosial di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan kepustakaan yaitu proses pengambilan data dari berbagai sumber referensi yang mendukung penulisan ini serta didapat dari kajian studi literature review sebagaimana yang disampaikan penelitian review dari database google scholar dan artikel yang relevan dengan topik yang dibahas dan diolah menggunakan tools serta wawancara langsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menyimak dan mencatat informasi yang penting dalam analisis datadengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pembinaan Teritorial TNI AD untuk pencegahan konflik sosial di Kodim 0618/Kota Bandung berdasarkan pendekatan teori grindle yang memiliki beberapa dimensi yaitu *Content of policy*, *Context of policy* dan *Policy goals*. Teori ini menawarkan 3 dimensi yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Keenam dimensi yang dapat menentukan keberhasilan kebijakan termasuk dalam kebijakan pembinaan teritorial TNI AD.

1. Content of Policy

a) Kepentingan yang dipengaruhi

Implementasi kebijakan pembinaan teritorial ini dilakukan oleh beberapa stakeholder antara lain TNI AD, Polri, Pemerintah Daerah dan masyarakat selaku tujuan utama dalam kebijakan pembinaan teritorial ini. Proses dan hasil pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh faktor internal, yakni kemampuan personel pelaksana kegiatan, serta faktor eksternal yang meliputi kesiapan pelaksana, sarana dan prasarana, waktu, dan dukungan anggaran. Penyelenggaraan pencegahan konflik sosial ada pada pasal 6 Unsur Penyelenggara. Unsur penyelenggara terdiri dari beberapa tingkatan dari Tingkat Mabes TNI diselenggarakan oleh Panglima TNI, tingkat Mabes TNI AD diselenggarakan oleh Kasad, tingkat Kodam diselenggarakan oleh Pangdam, tingkat Korem diselenggarakan oleh Danrem, tingkat Kodim diselenggarakan oleh Dandim, dan tingkat Koramil diselenggarakan oleh Danramil. Dengan kebijakan pembinaan teritorial ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengatasi dan meredakan konflik sosial yang terjadi di Kota Bandung.

Berdasarkan data yang di dapatkan dilapangan oleh peneliti dapat dianalisa bahwa kebijakan pembinaan teritorial di Kodim 0618/Kota Bandung berdampak adanya suasana dan situasi yang lebih tenang dan damai karena koramil dan babinsa memberikan pengamanan yang baik dan bekerjasama dengan pihak kepolisian maupun pemerintah daerah lain sehingga memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya kebijakan pembinaan teritorial ini dengan melakukan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang positif di lingkup kodim, polres, kapolsek maupun pemerintah daerah. Dampak positif dari ini memberikan pengaruh yang cukup dalam

menciptakan suasana yang damai dan tentram.

b) Manfaat yang dipengaruhi

Manfaat dari pembinaan teritorial ini adanya membantu masyarakat dalam bentuk aspirasi dan pelaksana pembinaan teritorial selalu siap dalam menjalankan kebijakan dan membantu masyarakat. Dari data yang didapatkan dilapangan oleh peneliti dengan narasumber maupun informan bahwa dengan adanya kebijakan pembinaan ini banyak manfaat yang dirasakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dianalisa implementasi kebijakan pembinaan teritorial ini memberikan manfaat yaitu memberikan kegiatan yang positif bagi masyarakat sekitar, meningkatkan kualitas pengetahuan dengan adanya sosialisasi mengenai kebangsaan nasionalisme, meningkatkan kompetensi baru dan menciptakan suasana yang tentram dan damai. Dapat disimpulkan bahwa pembinaan teritorial ini memiliki manfaat yang dapat dirasakan namun masih ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki dan menjadi bahan evaluasi dalam penerapan atau pelaksanaan kebijakan pembinaan teritorial.

c) Cakupan perubahan yang diharapkan

Proses investigasi implementasi kebijakan yang selanjutnya adalah analisis dimensi cakupan perubahan yang diharapkan, dalam hal ini adalah masyarakat Kota Bandung. Peneliti menganalisis lebih lanjut terkait dampak dari pelaksanaan kebijakan pembinaan teritorial terhadap pola pikir ataupun perilaku masyarakat terhadap konflik sosial, serta kesadaran masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik sosial.

Kebijakan wilayah teritorial yang telah dilaksanakan oleh TNI-AD membawa dampak positif terhadap perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk dari konflik sosial. Kehadiran aparaturnegara dan implementasi kebijakan ini dapat meredam konflik yang terjadi di masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menghindari konflik sudah terbentuk, akan tetapi masih perlu dimaksimalkan lagi. Babinsa, sebagai garda terdepan, juga perlu dibekali dengan kemampuan komunikasi dan teknologi yang baik untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Beberapa responden juga menyarankan agar para pembuat kebijakan dapat melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan untuk mengantisipasi konflik-konflik yang mungkin muncul di masa depan. Pembinaan

perilaku sosial masyarakat masih sangat diperlukan di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung. Selain pemahaman tentang wawasan kebangsaan, pembinaan perilaku sosial dan manajemen emosi masih perlu terus digiatkan untuk menekan angka kekerasan dan konflik sosial di wilayah Kota Bandung. Ini perlu juga difokuskan pada pembinaan karakter masyarakat di Kodim 0618/Kota Bandung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan Tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan atau potensi-potensi konflik lainnya.

d) Kedudukan Pembuat Kebijakan

Pada awalnya Binter dilaksanakan oleh satuan teritorial dengan nama Bintara Onder Distrik Militer (BODM), Komando Distrik Militer (KDM), Divisi Teritorial dan Teritorium. Periode berikutnya diadakan penyederhanaan organisasi melalui pembentukan satuan-satuan Komando Teritorial (Koter) yaitu Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil), seperti yang kita kenal hingga saat ini sebagai Komando Kewilayahan (Kowil), institusi yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah binaannya masing-masing.

Dalam tingkatan intervensi *policy fields* (bidang kebijakan) berperan dalam pembuatan kebijakan. Berbagai gagasan-gagasan yang dibuat untuk membawa perubahan dalam populasi target dipertimbangkan dan selanjutnya dilakukan identifikasi proses yang paling layak berdasarkan praktik berbasis bukti dan hasil analisis kebijakan tersebut disebarluaskan (implementasi). Pada dimensi kedudukan pembuat kebijakan, peneliti menganalisis proses perencanaan dan persiapan yang telah dilalui untuk membuat peraturan. Peneliti mengkaji hubungan historis perumusan kebijakan dan relevansinya terhadap publik melalui tahapan wawancara dengan perumus kebijakan teritorial yang saat ini tengah diterapkan. Terkait bidang kebijakan disini untuk mengetahui apakah peraturan yang dibuat berdasarkan logika/praktik berbasis bukti/hasil analisis dengan mempertimbangkan kualitas tujuan dan nilai publik.

Kebijakan yang diterapkan saat ini telah melewati proses saintifik/kajian yang panjang. Kebijakan yang diterapkan saat ini sudah melalui perhitungan yang matang terkait tujuan dan nilai yang akan berdampak terhadap prajurit TNI serta masyarakat umum secara luas. Peraturan yang diterapkan saat ini juga sebelumnya

sudah melewati uji kecocokan dengan kondisi masyarakat umum. Selain itu, pembaharuan-pembaharuan juga diterapkan agar relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Bencana alam yang rawan terjadi di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung adalah bencana banjir. Terkait hal tersebut, Babinsa/Danramil di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung selalu siap siaga membantu warga dalam proses pencegahan, evaluasi, serta rehabilitasi pasca banjir. Dalam hal ini, dimensi kedudukan pembuat kebijakan yang diterapkan oleh TNI AD, khususnya prajurit yang bertugas di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung sudah cukup memenuhi landasan substansi untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Penulis berpendapat bahwa dimensi ini telah berjalan optimal dalam implementasi kebijakan pembinaan teritorial TNI AD untuk pencegahan konflik di Kodim 0618/Kota Bandung

e) Pelaku Implementasi

Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2020-2024 dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 (Permenhan RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Negara tahun 2020-2024). Dalam hal ini, bahwa pembinaan teritorial yang dilaksanakan ditujukan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pembangunan nasional di wilayah yang akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan keamanan negara (Perpang TNI Nomor 1 tahun 2014). Selanjutnya, bahwa instrumen yang dipergunakan dalam membuat kebijakan telah didasarkan pada instrumen pemerintah yang telah disesuaikan dengan mempertimbangkan tujuan dan nilai publik.

Para prajurit TNI aktif melakukan Komsos (Komunikasi Sosial) di Kota Bandung. Pelaksanaan pembinaan dan komsos yang dilaksanakan Babinsa di Kodim 0618/Kota Bandung ini merupakan bentuk upaya optimalisasi social skills yang dimiliki oleh Babinsa sebagai pelaksana kebijakan pembinaan teritorial. Hasil analisis pada dimensi pelaku implementasi ini menunjukkan adanya capaian yang positif. Program Komsos atau Komunikasi Sosial yang dijalankan oleh Babinsa/Danramil di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung membuktikan bahwa anggota TNI yang bertugas di wilayah tersebut memiliki kemampuan sosial yang baik. Secara rutin dan konsisten dari tahun ke tahun Babinsa/Danramil Kodim 0618/Kota Bandung melaksanakan komunikasi sosial baik dengan Pemerintah

setempat, organisasi masyarakat, serta masyarakat sipil di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung. Di samping itu, adanya kegiatan bakti sosial yang rutin dijalankan oleh Babinsa/Danramil di Kodim 0618/Kota Bandung juga menjadi bukti bahwa prajurit TNI tersebut memiliki kemampuan sosial yang baik dalam mendekati diri dengan masyarakat dengan tidak segan-segan memberikan bantuan kepada masyarakat serta menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar.

f) Sumber Daya yang dialokasikan

Peneliti menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh *stakeholders* dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan teritorial untuk memitigasi konflik sosial di masyarakat. Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan teritorial untuk penanganan konflik sosial, baik Babinsa maupun Danramil dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. Konflik sosial yang terjadi dapat di atasi dengan pendekatan-pendekatan sesuai kebijakan yang ada, seperti mediasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan di lapangan, Babinsa selaku personel yang bersinggungan langsung dengan masyarakat memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Babinsa Koramil 1808/Coblong yang berinsial AD sebagai pelaksana teknis kebijakan di lapangan merasakan kendala-kendala yang dihadapi dilapangan namun dapat dihadapi dengan baik. Pelaksanaan pembinaan tertorial untuk pencegahan konflik sosial yang telah dilaksanakan selama ini dapat berjalan dengan baik. Bahwa dalam pelaksanaannya dirasakan oleh para Danramil dan Babinsa di lapangan terdapat kendala-kendala, namun masih dapat diatasi dengan baik. Sinergi Tiga Pilar yang telah dijalankan di masyarakat telah membantu Babinsa di lapangan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tugas. Keterpaduan koordinasi yang dilakukan oleh Tiga Pilar di wilayah tentunya akan meningkatkan kinerja dari masing-masing instansi sehingga menjadi handal, termasuk dalam hal ini kinerja dari anggota Koramil. Permasalahan sosial dan ketenagakerjaan menjadi salah satu pemicu potensi konflik. Tercatat beberapa perkiraan ancaman di daerah yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Konflik yang terjadi maupun Potensi Konflik dalam Masyarakat

Potensi Ancaman yang Menimbulkan Konflik	Keterangan
Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak menjadi salah satu perkiraan ancaman yang terjadi di Masyarakat	Pemilu dan pilkada serentak dianggap rawan karena dapat memicu konflik internal maupun antar golongan masyarakat dan partai politik
Konflik antara Sunni dan Syiah pun masuk dalam perkiraan ancaman di daerah.	Konflik ini dinilai bisa berkembang kepada dukungan di masyarakat hingga keberangkatan kelompok Islam garis keras yang nantinya bergabung dengan ISIS.
Kontroversi pembangunan rumah ibadah yang memicu bentrokan antar pihak di daerah	Persoalan pembangunan rumah ibadah yang tidak memiliki ijin sering menjadi penyebab bentrokan di sebagian wilayah di Jawa Barat
Usaha pendirian negara Islam Indonesia oleh sebagian kalangan yang memicu terjadinya gerakan terorisme, radikalisme hingga separatism	Masih terdapat sebagian kelompok di Jawa Barat yang menghendaki pembentukan negara Islam sehingga mereka melakukan upaya-upaya ekstrim dan radikal.
Aksi dari kelompok-kelompok oposan, seperti pergerakan buruh, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan lain.	Konflik yang sering terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang biasanya di dahului dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis di tempat-tempat umum.
Bentrok antar warga di wilayah	Sengketa yang sering terjadi biasanya perebutan lahan dan sengketa Sumber Daya Alam

Sumber: Data diolah BIN Provinsi Jawa Barat, (data diolah, 2023)

Mencermati tabel di atas, bahwa semua potensi ancaman yang menimbulkan konflik dapat terjadi di Kota Bandung. Oleh sebab itu potensi konflik yang akan terjadi harus selalu dideteksi secara dini, sehingga tidak menjadi konflik yang lebih luas. Dari beberapa narasumber menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang masih dalam batas kewajaran, namun dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan masih dapat diatasi dengan baik, maka penulis berpendapat bahwa dimensi cakupan perubahan yang diharapkan sudah dapat tercapai dalam implementasi kebijakan pembinaan teritorial untuk pencegahan konflik sosial di Kodim 0618/Kota Bandung.

g) Kekuatan, Minat dan Strategi

Pada kebijakan pembinaan teritorial yang diterapkan di wilayah Kodim 0618/Kota

Bandung, standar dan uraian dari implementasi peraturan tersebut sudah terurai dengan jelas. Di dalamnya sudah mencakup tugas pokok/tanggungjawab setiap aparat Satkowil dalam kegiatan pembinaan teritorial yang dilakukan di wilayah teritorial masing-masing. Pedoman kebijakan yang memiliki kualitas standar dan tujuan yang baik pastinya akan mudah dipahami oleh pelaksana teknis kebijakan/implementator di lapangan. Selanjutnya, kecakapan Danramil dan Babinsa sebagai implementator kebijakan pembinaan teritorial menjadi salah satu faktor krusial yang mempengaruhi ketercapaian tujuan dari kebijakan pembinaan teritorial di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung. Para Danramil dan Babinsa yang bertugas di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung sudah dibekali dengan kompetensi yang cukup baik. Mereka sudah memiliki pemahaman konsep terkait kebijakan pembinaan teritorial yang tertuang dalam peraturan dan pedoman, serta mereka dapat mengimplementasikannya dengan tepat di wilayahnya masing-masing. Uraian hasil wawancara di atas dan data pendukung yang ada menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pembinaan teritorial di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung sudah terlaksana dengan cukup baik, terbukti dengan implementator (Danramil/Babinsa) yang memiliki pemahaman mencukupi terkait standar dan tujuan kebijakan yang tertuang dalam pedoman/peraturan.

h) Karakteristik Instansi Pelaksana

Keputusan operasional tentang intervensi dibuat di tingkatan organizations dan para pelaku dalam organisasi membuat keputusan lintas level dan mengkoordinasikan intervensi. Dalam pelaksanaan pembinaan teritorial, bahwa intervensi diselenggarakan melalui kerjasama dan sinergi Tiga Pilar dalam hal ini Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Lurah. Melalui koordinasi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Tiga Pilar, secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja anggota Koramil (Mulyono, 2015).

Terkait kegiatan menjaga kerukunan, ketertiban, dan keamanan di wilayah Kota Bandung. Selain aparatur negara, ormas dan tokoh masyarakat juga terlibat dalam kegiatan menjaga kerukunan, ketertiban, dan keamanan wilayah ini. Setiap unsur rutin melaksanakan apel, khususnya pada malam minggu hingga hari minggu untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Kegiatan ini dilakukan dengan bersinergi agar lebih efektif dan efisien. Kegiatan Tiga Pilar tersebut rutin dilaksanakan bersama dengan segenap komponen diluar TNI AD. Para perwakilan

dari institusi TNI AD dan Polri tersebut secara senada menyampaikan Tiga Pilar bersama antar organisasi untuk mengendalikan konflik sosial di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung. Tidak hanya dari unsur TNI dan Polri. Keterlibatan seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi juga menjadi nilai positif bagi kebermanfaatan Tiga Pilar. Pengawasan di wilayah-wilayah yang rawan tawuran remaja juga dilakukan secara bersama-sama oleh tiga pilar ini dan dengan dukungan dari masyarakat setempat.

i) Kepatuhan dan daya tanggap

Dalam pelaksanaan tugasnya, Danramil/Babinsa yang melaksanakan tugas pembinaan teritorial telah mendapatkan pembekalan terlebih dahulu sebelum ditugaskan ke lapangan. Institusi menyediakan Pendidikan Danramil dan Babinsa untuk para prajurit sebagai bekal sebelum mulai bertugas (Laporan Evaluasi Program dan Anggaran TNI AD Tahun 2022). Setiap tahun juga dilaksanakan pelatihan MTT (*Mobile Training Team*) serta pelatihan kemampuan teritorial dan komunikasi massa. Para Babinsa yang bertugas di wilayah teritorial juga memiliki kemampuan menganalisis dan memprediksi permasalahan yang mungkin timbul di wilayah teritorialnya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan kemampuan *problem solving* yang baik agar dapat membuat perkiraan pemetaan solusi yang tepat ketika terjadi konflik. Populasi generasi X cenderung memiliki karakteristik individual dari segi partisipasi kerja, pekerja keras dalam hal upaya penyelesaian konflik namun dari segi komunikasi tidak terlalu tertarik pada kecanggihan teknologi untuk membantu dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Bapak Kapten Inf. Ida Bagus selaku Komandan Koraramil 1808/Coblong Kodim 0618/Kota Bandung menyatakan sumber daya manusia (SDM) khususnya Babinsa saat ini memiliki kendala dalam hal menggunakan teknologi khususnya bagi Babinsa yang sudah senior/tua.

Terkait pengetahuan Babinsa terhadap pemahaman wilayah, bahwa para Babinsa juga intens dalam memberikan pembinaan di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung, informasi dari para narasumber menunjukkan bahwa Babinsa sudah cukup intens menjalankan tugasnya untuk memberikan pembinaan teritorial kepada masyarakat. Babinsa juga turut mengambil peran untuk mengedukasi masyarakat terkait konflik sosial serta dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga jika ada indikasi terjadi konflik, Babinsa dapat memberi

penyuluhan kepada warga untuk mencegah timbulnya gesekan yang lebih besar. Sebagai garda terdepan pelaksanaan kebijakan teritorial TNI, Babinsa diharuskan untuk dapat selalu dekat dengan masyarakat dan paham dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Babinsa juga secara kolaboratif berkerjasama dengan Bhabinkamtibmas dan para Lurah di Kodim 0618/Kota Bandung untuk bersinergi bersama meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik sosial di masyarakat. Kemampuan Babinsa dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan aparatur negara lainnya seperti Polri dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang dapat membantu optimalisasi TNI AD dalam menjaga keamanan wilayah teritorial. Koordinasi yang sudah dilaksanakan Babinsa Bersama dengan institusi Polri dan Pemerintah Daerah ini juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Babinsa, khususnya di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung. Dari data-data diatas, penulis berpendapat bahwa intensitas Babinsa dalam penguasaan wilayah sudah berjalan dengan baik, Babinsa telah melekat ke masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Babinsa sudah melebihi target yang diharapkan, hal tersebut telah menunjukkan bahwa kinerja Babinsa sudah sangat baik. Terkait sinergi, kolaborasi dan kerja sama yang dilakukan bersama dengan unsur Tiga Pilar juga sudah terjalin dengan baik. Namun, dari segi kualifikasi penguasaan teknologi bahwa Babinsa secara mayoritas masih kurang.

1). Policy Goals

Peran pembinaan teritorial TNI AD yang dimanfaatkan salah satunya sebagai upaya pencegahan konflik sosial karena memang kegiatan tersebut sejatinya untuk menyiapkan wilayah pertahanan sebagai daya tangkal bangsa (Doktrin Teritorial TNI AD Tahun 2021). Hal tersebut didukung juga oleh pendapat Bapak Kolonel Inf. Donny Ismuali Bainuri selaku Komandan Kodim 0618/Kota Bandung menyatakan bahwa metode pembinaan teritorial merupakan metode yang sangat tepat untuk di implementasikan khususnya dalam upaya pencegahan konflik sosial. Kolonel Inf. Donny Ismuali Bainuri selaku Komandan Kodim 0618/Kota Bandung, implementasi kebijakan pembinaan teritorial ini sangat tepat diterapkan di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung karena kebijakan ini dapat menguatkan hubungan antara TNI dengan masyarakat serta masyarakat dengan sesama masyarakat lainnya. Dengan

demikian, keamanan dan kedamaian wilayah teritorial akan lebih mudah dikondisikan. Bapak Drs Tatang Hamdani, M.PA selaku Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik turut memberikan pandangan terkait metode pembinaan teritorial yang telah diselenggarakan merupakan metode yang baik untuk pencegahan konflik sosial.

Penerapan kebijakan pembinaan teritorial mempunyai potensi sebagai kebijakan yang bersifat preventif dan antisipatif dalam rangka mengurangi konflik komunal dan sosial di masyarakat. Hasil wawancara dengan berbagai sumber di atas menunjukkan bahwa metode pembinaan teritorial yang telah diterapkan oleh TNI-AD selama ini sudah sesuai dengan permasalahan yang sering muncul di lapangan dan sudah cukup tepat untuk diterapkan dalam rangka menanggulangi konflik sosial yang terjadi. Implementasi dari metode pembinaan dari TNI AD ini mengajarkan masyarakat untuk dapat meminimalisir terjadinya konflik. Namun jika konflik sosial terjadi, TNI bersama dengan masyarakat dapat bahu-membahu menyelesaikan konflik tersebut dengan cepat dan efektif agar tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar. Implementasi dari metode pembinaan teritorial ini membuat peran TNI menjadi lebih efektif dalam mencegah dan menangani konflik vertikal maupun horizontal. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pembinaan teritorial ini cukup efektif untuk diimplementasikan di daerah-daerah yang rawan konflik. Pada praktiknya, pembinaan teritorial ini berhasil menekan gesekan atau konflik sosial yang ada di masyarakat. TNI dapat menempatkan diri dengan baik sebagai mediator dengan menerapkan kebijakan yang cukup persuasif dan adaptif. Babinsa/Danramil di wilayah 0618/Kota Bandung selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, organisasi terkait, masyarakat dan pusat terkait kegiatan-kegiatan pembinaan yang dijalankan. Sesuai dengan keterangan diatas, maka penulis berpendapat bahwa variabel *policy goals* sudah dapat tercapai dalam implementasi kebijakan pembinaan teritorial untuk pencegahan konflik sosial di Kodim 0618/ Kota Bandung.

PENUTUP

Kebijakan Pembinaan Teritorial TNI AD untuk pencegahan konflik sosial di Kodim 0618/Kota Bandung sudah berjalan optimal, hal ini dapat terlihat dari hasil analisis bahwa telah menunjukkan optimalnya variabel *content of policy*, *context of policy*, dan *policy goals*. Melalui pendekatan Gindle (2017), maka diketahui pada variabel *content of policy*, bahwa minimnya kesulitan yang dihadapi oleh aparat teritorial di wilayah dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan teritorial dan telah menunjukkan bahwa metode pembinaan teritorial TNI AD hingga saat ini merupakan metode yang sesuai dan tepat dalam upaya pencegahan konflik sosial di masyarakat. Kebijakan pembinaan teritorial yang dibuat oleh keputusan pada tingkat strategis telah dapat mengintervensi dengan baik. Begitu juga keputusan pada tingkat operasional (*organizations*) yang dapat mengintervensi program yang telah dijalankan. Para aktor memiliki kemampuan dalam mempengaruhi pemahaman kelompok sasaran serta pemanfaatan kejadian tidak terduga yang mampu menciptakan kewenangan baru dalam rangka optimalisasi pembinaan teritorial TNI AD untuk pencegahan konflik sosial. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Babinsa di lapangan menunjukkan bahwa perubahan sebagai akibat dari intervensi yang belum optimal. Selanjutnya, dari segi penguasaan teknologi, bahwa Babinsa secara mayoritas masih kurang. Rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari konflik sosial. Pola komunikasi warga yang masih kurang terbuka. Kurangnya kepedulian tokoh masyarakat untuk membina warganya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran bagi optimalisasi implemementasi kebijakan pembinaan teritorial TNI AD untuk pencegahan konflik sosial di Kodim 0618/Kota Bandung. Pelatihan-pelatihan keamanan *cyber* ataupun peningkatan kompetensi terkait kecakapan teknologi Babinsa/Danramil perlu dilaksanakan agar Babinsa/Danramil yang bertugas di wilayah Kodim 0618/Kota Bandung agar dapat terus berinovasi dalam penyusunan program dan dapat menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Mengingat Kota Bandung masih menjadi wilayah dengan geng motor yang cukup tinggi dan sarannya anak SMP dan SMA, direkomendasikan agar ke depannya dilaksanakan program-program pembinaan yang dilakukan kepada orang tua. Direkomendasikan diadakan program anjangsana dari pejabat/staf Kodim 0618/Kota Bandung dan Koramil setempat kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat yang mengalami

kendala/permasalahan. Pada tahap perencanaan dan persiapan program pembinaan teritorial khususnya pada program Komunikasi Sosial dan Bhakti TNI, direkomendasikan untuk melibatkan tokoh masyarakat dalam merencanakan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrid Susanto. 2006. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.
- Baron, P. (2014). *How Large Conflict Subside: Evidence from Indonesia*. The World Bank.
- Bartos & Wehr. (2022). *Using Conflict Theory. United States of America*: Cambridge University Press.
- Basuki. E. S. (2008). *Peran TNI Angkatan Darat dalam Mendukung Pertahanan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Birkland, T. A. (2015). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts and Models of Public Policy Making*. New York: Routledge.
- Birkland, T. A. (2020). *An Introduction to The Policy Process*. Newyork: Routledge.
- Bochel, C. & Bochel, H. (2018). *Making and Implementing Public Policy: Key Concepts and Issues*. London: Palgrave.
- Cresswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (4th ed.)*. (Terj). Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Florida: Pearsong Education.
- Fischer, et al. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Method*. Sidney: Taylor & Francis Group.
- Grindle, M.S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Ney Jersey: Princeton University Press
- Howlett, M. (2019). *Designing Public Policies: Principles and Instruments*. New York: Routletdge.
- Keputusan Kasad Nomor Kep/878/XII/2021 tentang Doktrin Teritorial TNI AD.
- Kingsley, G. (2018). *Effective Implementation in Practice: Integrating Public Policy and Management, By Jodi Sandfort and Stephanie Moulton. International Public Management Journal*, 330-333.
- Open data Jabar. 2021. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-kasus-konflik-lainnya-berdasarkan-desakelurahan-di-jawa-barat>
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 77/X/2009 tentang Pembinaan Teritorial.
- Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan

Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 13 Tahun 2016 *tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial.*

Peraturan Panglima TNI Nomor 1 Tahun 2014 *tentang Peran Teritorial TNI Dalam Mencegah Konflik Sosial.*

Robert H. Lauer. 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Smith, R., Girth, A., & Hutzel, M. (2021). *Assessing Organizational Role and Perceptions of Programmatic Success in Policy Implementation.* *Administration & Society*, 1512-1546.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 *tentang Tentara Nasional Indonesia*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 *tentang Penanganan Konflik Sosial*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 *tentang Pertahanan Indonesia*

Winarno. B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Yogyakarta: CAPS Publishing.

Xue, et al. (2022). *How Does Policy Implementation Affect the. Public Performance & Management Review*, 1029-1065.

Yudiatmaja, W. E. (2016). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Tanjungpinang: Umrah Press